

Peta Jalan Poros

Maritim

Arif Satria

Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB
Anggota Dewan Kelautan Indonesia (Dekin)
Doktor Marine Policy Kagoshima University Jepang

TUJUH bulan sudah Jokowi memimpin Indonesia. Pertanyaan yang sudah bermunculan ialah apa kabar poros maritim dunia? Tentu ini pertanyaan yang sangat wajar mengingat poros maritim telah menjadi trademark Jokowi sehingga publik menanti kapan Indonesia sebagai poros maritim bisa terwujud dan apa yang saat ini sudah dirintis untuk menuju ke sana. Juga, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mempercepat proses itu semua?

Makna

Seolah kita sudah taken for granted terhadap konsep poros maritim. Namun, hingga saat ini pemerintah belum menerjemahkan gagasan presiden tersebut dalam bahasa yang mudah dipahami publik. Sebagai sebuah gagasan utama presiden, mestinya konsep poros maritim bisa menjadi wacana baru tidak hanya di kalangan elite tetapi juga rakyat. Wacana yang baik ialah wacana yang jelas maknanya sehingga publik paham dan bisa menaruh harapan. Yang terjadi saat ini ialah poros maritim dimaknai secara beragam oleh berbagai pihak sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kepentingan masing-masing. Mestinya konsep poros maritim itu satu dan seluruh aparat pemerintah memaknainya sama.

Ketika ditanya apa itu poros maritim, secara sederhana kita bisa merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Poros berarti sumbu dan maritim berarti berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan perdagangan dan pelayaran di laut. Namun, pengertian maritim yang dimaksud Jokowi ialah lebih umum dari sekadar pelayaran. Dengan demikian, poros maritim dunia ialah pusat kekuatan maritim yang disegani di dunia yang mampu menjadikan sumber daya laut sebagai pilar pembangunan nasional baik secara ekonomi, sosial budaya, maupun

Fakta geografis menunjukkan Indonesia merupakan negara kepulauan karena Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau. Namun, fakta ekonomi menunjukkan Indonesia belum menjadi negara maritim karena kita belum mampu mendayagunakan potensi kelautan sebagai pilar ekonomi nasional. Dengan meminjam istilah Hasyim Djalal, Indonesia ialah negara kepulauan yang belum menjadi negara maritim. Visi poros maritim dunia penting untuk mewujudkan negara maritim.

Peta jalan

Untuk mewujudkan poros maritim dunia diperlukan peta jalan yang jelas dan terukur. Pertama, penataan ruang laut. Amanat Undang-Undang Kelautan sangat jelas bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab atas penataan ruang laut di atas 12 mil. Adapun pemerintah provinsi bertanggung jawab atas wilayah kurang dari 12 mil. Tata ruang tersebut sangat penting karena di sinilah alokasi ruang untuk aktivitas ekonomi sektoral akan ditentukan sehingga tumpang-tindih atau konflik pemanfaatan ruang laut bisa dihindari. Begitu pula tata ruang laut bisa menciptakan kepastian investasi.

Pada saat yang sama, tata ruang laut juga harus bisa melindungi pelaku usaha terlemah di laut, yaitu nelayan dan pembudi daya ikan. Selama ini pemanfaatan ruang laut di atas 12 mil amburadul

karena memang belum ditata, seperti terlihat dari pemasangan pipa atau kabel bawah laut yang tidak terpolo dengan baik. Juga, penataan ruang laut di bawah 12 mil yang merupakan amanat UU 1/2014 sebagai revisi atas UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir belum terwujud dengan baik. Buktinya hanya sekitar 15% provinsi di Indonesia yang sudah memiliki rencana zonasi pesisir. Padahal, UU tersebut sudah berlaku sejak delapan tahun lalu. Karena itu, agenda pentingnya ialah akselerasi penyusunan tata ruang laut.

Kedua, membangun infrastruktur dan konektivitas maritim. Ide tol laut merupakan bagian dari agenda kedua ini. Tol laut merupakan jalan untuk memastikan konektivitas antar-

